

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Oka, Mahendra, (1996), *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*, Jakarta; Sinar Harapan.

Abdurahman, (1978), *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Seri Hukum Agraria 1, Bandung; Penerbit Alumni.

Budi Harjanto, Sukirno, Irma Cahyaningtya, 2019, *Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat Di Konsensi Tambang Pt. Mahakam Sumber Jaya Kabupaten Kutai Kertanegara*, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1

Erika, (2018), *Konflik Pembebasan Lahan di wilayah Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konsesi Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 4 Nomor 2

Hallaud, D.K.,Matuankotta, J.K.,& Uktolseja, N (2021). *Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon*. SASI, Vol. 27 No.1

Ibrahim Ahmad, 2010, *Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan*, VOL.3 No.2

Isnaini dan Anggreni A,Lubis, 2022, *Hukum Agraria:kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan.

John Salindehi, (1988), *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta; Sinar Grafika

Kotalewaha, F., Laturette, A.I., & Uktolseja,N. (2020). *Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum*. SASI, 26 (3), 415-433. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397>

Laturette, A.I(2016). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*. SASI Vol 27 No 1

M. Macfudh Zarqoni, Mohammad, 2015 *Hak Atas Tanah*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

Moh. Koesno, (1978), *Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga Universitas Press.

Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV. Mandar Maju, Bandung, (2008).

Oloan Sitorus dan Normadyati, (1994), *Hak Atas Tanah dan Kondominium Suatu Tinjauan Hukum*, Jakarta: Dasamedia Utama.

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' theory Of Justice)*, Jurnal Kpnstitusi, VOL 6, Hal 140, N0 1

Rusdin Alaudin, Dkk, 2016, *Sengketa Lahan Akibat Pertambangan Nikel: Sebingkai Potret Dari Maluku Utara*. Vol III, No 2 Jurnal ETNOHISTORI.

Sumampouw Rifi Marcelino, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Kegiatan Pertambangan*, Lex Privatum Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020

Sumardjono, Maria S.W (2005). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas

Sunaryati Hartono, (1979), *Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah*, Bandung; Alumni.

Supriyadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Suyanto, 2013, *RaTA Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan*, STPN press.

Teguh Prasetio dan Kardawati Budiharjo, 2013, *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media, Bandung

Urip Santoso, *Pendaftaran dan peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, (2010).

Wartamaya Winangun S.J., (2004), *Tanah Sumber Nilai Hidup*, Yogyakarta, Kanisius.

Wolfgang Friedman, (1972), *Law in Changing Society*, England: Penguin Book.

Yurijaya, (2023), *Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol.5, No.2.

Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tanggal 17 November 1973 tentang Pedoman -Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tanggal 17 November 1973 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.

Pasal 16, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah, Sistematis Lengkap, Hal. 22

Pasal 6, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Perka BPN No. 3 Tahun 2011, Bab I, Pasal 1 angka 2 dan angka 3

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16.

Websait

<https://www.forestdigest.com/detail/2136/kawasan-hutan>, Diakses pada Tanggal 01 Juli 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b>. diakses pada 15 januari 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b>. Senin, 15 Januari 2024

<https://www.scribd.com/document/375904788/Pengukuran-Lahan-Adalah-Pelaksanaan-Pekerjaan-Pengukuran-Untuk-Mengetahui-Luas-Dan-Batas-Batas-Lahan-Yang-Berseberangan-Yang-Mengacu-Pada-Ketentuan->

